

Implementasi Program *Sustainable Development Goals* dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Andi Vira Yulianti¹, Alwi²

Universitas Hasanuddin, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi Author: andivirayulianti93927@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Implementasi Kebijakan;
SDGs Desa; Pengentasan
Kemiskinan; Desa
Laburasseng; Model
Grindle.

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kemiskinan di Desa Laburasseng yang cenderung stagnan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng, Kabupaten Bone menggunakan teori Marille S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif. Hal ini didukung data bahwa persentase penduduk miskin justru meningkat dari 15,63% pada tahun 2021 menjadi 15,85% pada tahun 2022, dan hanya turun tipis ke 15,74% pada tahun 2023. Pada variabel isi kebijakan, indikator manfaat dan sumber daya belum optimal karena infrastruktur jalan yang rusak menghambat distribusi bantuan. Pada variabel konteks, koordinasi antara pemerintah desa dan pusat masih lemah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran karena penggunaan data DTKS yang tidak mutakhir dari Dinas Sosial Kabupaten Bone, seperti masih tercantumnya penerima yang sudah meninggal atau pindah penduduk. Pemerintah desa diharapkan meningkatkan sinkronisasi data dengan lembaga terkait untuk akurasi penerima bansos.

Keywords:

*Policy Implementation;
Village SDGs; Poverty
Alleviation; Laburasseng
Village; Grindle Model.*

Abstrack

The main problem in this research is the high and stagnant poverty rate in Laburasseng Village. This descriptive qualitative research aims to analyze the implementation of the SDGs Program in handling poverty in Laburasseng Village, Bone Regency, using Marille S. Grindle's theory. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The research results indicate that the program has not been effective. This is supported by data showing that the percentage of poor people actually increased from 15.63% in 2021 to 15.85% in 2022, and only slightly decreased to 15.74% in 2023. In terms of policy content, benefits and resource indicators are not optimal due to damaged road infrastructure hindering assistance distribution. Regarding the context variable, coordination between the village and central government remains weak, leading to mistargeted assistance caused by outdated DTKS data from the Bone Regency Social Affairs Office, which still includes deceased or relocated residents. The village government is expected to improve data synchronization with relevant institutions to ensure the accuracy of social assistance recipients.

Pendahuluan

Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs merupakan rancangan target atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. SDGs telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 september 2015. SDGs menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (*Millenium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama yang telah disepakati oleh banyak negara yang berakhir pada tahun 2015 pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator yang tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030 (Linggarwati et al., 2021).

Salah satu negara yang ikut menyepakati agenda SDGs ialah pemerintah Indonesia yang menunjukkan komitmen dan keserasian dalam pelaksanaan SDGs adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan berkelanjutan. Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan

komitmen tersebut agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Gitleman & Kleberger, 2014).

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu poin SDGs yaitu poin pertama *no poverty* (tanpa kemiskinan) yang merupakan tujuan utama yang ingin diselesaikan dan ditekankan oleh program SDGs. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia ialah berkurangnya jumlah penduduk miskin, dimana pembangunan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada masalah kemiskinan (Gitleman & Kleberger, 2014). Tujuan dilaksanakannya pembangunan ekonomi tidak lain untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya program SDGs dimaksudkan guna mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Tujuan secara umum yang ingin dicapai menurut *United Nations Sustainable Development* (PBB, 2015) pada program SDGs khususnya pada poin kemiskinan ialah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Terdapat beberapa target yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin kemiskinan yakni pada tahun 2030, pengentasan kemiskinan bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari; mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional; pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan, sumber daya alam, teknologi, dan jasa keuangan yang tepat; pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan mengurangi kerentanan terhadap peristiwa ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya.

Program SDGs juga menekankan pada pemenuhan hak asasi manusia, non diskriminasi serta pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan baik aktor negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan organisasi masyarakat sipil dalam kepentingan pembangunan dengan mencapai salah satu tujuan dari SDGs yaitu target mengurangi kemiskinan yang menjadi proyeksi dalam MDGs yang belum terselesaikan.

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemiskinan mampu menjadikan suatu negara mengalami kekacauan karena ketidakpuasan masyarakat akan pemerintah yang tidak mampu memberikan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat mengakibatkan banyaknya anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tingkat kematian yang tinggi/kesehatan yang buruk, tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, pengangguran dan pekerjaan yang tidak stabil, serta masih banyak lagi dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh kemiskinan.

Tabel 1.
Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

N	Kabupaten/Kota	Penduduk miskin (%)
1	Pangkajene dan Kepulauan	13,92
2	Jeneponto	13,73
3	Luwu utara	13,22
4	Luwu	12,49
5	enrekang	12,39
6	Selayar	12,24
7	Tana toraja	12,18
8	Toraja utara	11,65
9	Bone	10,58
1	Maros	9,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (2022)

Kabupaten Bone adalah kabupaten yang menduduki posisi ke-9 dengan penduduk miskin di provinsi Sulawesi Selatan. Kemiskinan penduduk di kabupaten Bone masih tergolong relatif tinggi. Angka kemiskinan kabupaten Bone pada tahun 2020 dengan tingkat penduduk miskin sebesar 10,68% dengan jumlah penduduk sebesar 801.775 jiwa. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kabupaten Bone menurun sebesar 10,52% dengan jumlah penduduk sebesar 806.750 jiwa dan angka kemiskinannya meningkat kembali pada tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,58% dengan jumlah penduduk sebesar 813.188 jiwa.

Tabel 2.
Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Menurut Data Kecamatan Tahun 2022

No	Desa	Penduduk miskin (%)
1	Mallinrung	22,05
2	Laburasseng	15,85
3	Ponre-ponre	13,49

Sumber: Data Kecamatan Libureng (2022)

Kecamatan Libureng adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bone bagian selatan. Kecamatan Libureng terdiri dari 2 kelurahan yaitu kelurahan Tanah Batue dan Kelurahan Ceppaga serta 18 desa, salah satu diantaranya adalah Desa Laburasseng. Menurut data pemerintah desa (2022) yang diperoleh, Desa Laburasseng berada di urutan kedua dengan presentase penduduk miskin di Kecamatan Libureng sebesar 15,85% dengan jumlah penduduk 1.299 jiwa. Urutan pertama dengan presentase penduduk miskin tertinggi ialah Desa Mallinrung sebesar 22,05% dengan jumlah penduduk 2.394 jiwa, dan urutan ketiga yaitu Desa Ponre-ponre dengan presentase penduduk miskin sebesar 13,49% dengan jumlah penduduk 1.889 jiwa.

Desa Laburasseng merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Libureng dengan penduduk miskin yang masih tinggi. Tercatat 33 rumah penduduk di Desa Laburasseng yang tidak layak huni dan 5 diantaranya yang belum teraliri listrik. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Laburasseng pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2021, 2022, dan 2023 disebutkan bahwa tercatat 371 kepala keluarga yang termasuk dalam kategori miskin melalui bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan jumlah kepala keluarga sebesar 405, data tersebut stagnan dan tidak ada penurunan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya penambahan ataupun pengurangan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan PKH. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial di Desa Laburasseng selama pelaksanaan program SDGs tidak berubah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tanyo Nandi Purwoko (2023) dengan judul penelitian "Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung" mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program *Sustainable Development Goals* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung. Dari penelitian ini diketahui bahwa pada indikator sumber daya mengenai program *Sustainable Development Goals* (SDGs) kurang berhasil menerapkan nilai implementasi kebijakan. Kurang berhasilnya disebabkan oleh sumber daya yang ada belum sempurna mengarah kepada program SDGs, sehingga perlu ada perbaikan agar nantinya tujuan yang diinginkan bisa selaras dengan implementasi yang dilakukan.

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Islam Faruk Zaini (2021) dengan judul "Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)" mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan *sustainable development goals* (SDGs) dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang berada di wilayah pedesaan dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program *sustainable development goals*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *sustainable development goals* pemerintah Desa Wargajaya mengaplikasikan program turunan yang dicanangkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yaitu SDGs Desa (Zaini, 2021).

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai strategi pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh Novayanti Sophia Rukmana dkk (2022) dengan judul "Pengentasan Kemiskinan Melalui

Social Preneur” khususnya bagi kelompok PKK. Pada penelitian tersebut mengemukakan bahwa pada pelaksanaan pengabdian yang dilakukan di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dikatakan berhasil karena telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peningkatan perekonomian melalui *social preneur* di kalangan ibu-ibu yang terkait dalam organisasi PKK dan bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta dapat memasarkan produk olahan berbasis ekonomis (Sakawati H, Yamin N. M, Rukmana N.S, 2020).

Meskipun beberapa penelitian telah membahas SDGs dan kemiskinan, penelitian ini memiliki urgensi khusus karena berfokus pada dinamika implementasi di tingkat desa dengan karakteristik sosiografis spesifik di Kabupaten Bone yang masih memiliki angka kemiskinan stagnan, serta menggunakan pendekatan teori Marille S. Grindle untuk membedah variabel isi kebijakan secara lebih mendalam dibandingkan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program SDGs dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Laburasseng serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan di lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan fokus utama pada efektivitas program SDGs dalam menangani kemiskinan. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Adapun informan tersebut meliputi pihak internal Pemerintah Desa Laburasseng, yaitu Kepala Desa beserta jajaran Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Perencanaan dan Pembangunan, serta pihak eksternal yang mencakup masyarakat penerima manfaat bantuan sosial.

Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para informan, dan dokumentasi terhadap laporan berkala serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desa. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan sistematis, yaitu kondensasi data untuk menyederhanakan temuan mentah, penyajian data secara deskriptif untuk memetakan variabel penelitian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan. Untuk menjamin validitas dan keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data dari informan yang berbeda, serta melakukan *member check* untuk memastikan bahwa interpretasi data telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber.

Hasil dan Diskusi

Bagian ini memaparkan hasil temuan lapangan mengenai efektivitas implementasi program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng. Analisis dilakukan dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Marille S. Grindle, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh dua variabel utama, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Fokus kajian ini diarahkan pada bagaimana tujuan pengentasan kemiskinan diterjemahkan ke dalam program bantuan sosial serta sejauh mana dinamika aktor di tingkat lokal memengaruhi ketepatan sasaran bantuan tersebut.

Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Pada teori Marille S. Grindle dalam (Subarsono, 2008) menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa ini.

Implementasi program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng menunjukkan adanya keterkaitan erat antara isi kebijakan dengan berbagai kepentingan aktor yang terlibat. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat indikasi kuat mengenai pengaruh kepentingan ekonomi dalam distribusi bantuan sosial, yang terlihat dari pola kerja sama antara pemerintah desa dengan pengusaha lokal dalam penyediaan komoditas pangan, seperti telur, bagi masyarakat. Fenomena ini

selaras dengan model implementasi Marille S. Grindle yang memandang proses implementasi sebagai interaksi politik dan administratif di mana kepentingan aktor dapat berperan sebagai faktor konteks yang memengaruhi keberhasilan program. Jika aktor ekonomi memiliki komitmen yang sejalan dengan tujuan kebijakan, maka keterlibatan mereka dapat memperkuat efektivitas penyaluran bantuan. Hal ini juga dipertegas oleh perspektif Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa lingkungan ekonomi dan sosial organisasi pelaksana memiliki pengaruh signifikan terhadap output kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan program bantuan sosial di Desa Laburasseng sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan para aktor tersebut mampu disinergikan dengan target pengurangan angka kemiskinan. Teori Grindle (Subarsono, 2008) memandang implementasi sebagai proses politik dan administrasi yang sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam implementasi program bantuan sosial, kepentingan ekonomi dapat berperan sebagai faktor konteks yang mempengaruhi keberhasilan program. Misalnya, jika pengusaha lokal yang menyuplai telur memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan dalam menjalankan program, maka mereka lebih berkomitmen untuk melaksanakan program dengan efektif.

Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2008) mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari organisasi pelaksana akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam implementasi program bantuan sosial, kepentingan ekonomi dapat berperan sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan program. Misalnya, jika lingkungan ekonomi yang kurang stabil, maka program bantuan sosial mungkin tidak dapat berjalan dengan efektif karena kurangnya sumber daya yang diperlukan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui, sudah berjalan dengan efektif antara indikator kepentingan menurut Grindle (Subarsono, 2008) dengan kondisi di lapangan, hal ini dapat dinilai dengan melihat dilapangan bahwa dengan adanya kepentingan ekonomi dari pengusaha lokal dapat berperan sebagai faktor konteks dan lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan program bantuan sosial.

Jenis Manfaat yang Diinginkan

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa program SDGs melalui bantuan sosial di Desa Laburasseng telah memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Namun, distribusi manfaat ini belum sepenuhnya merata karena adanya fenomena ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima bantuan. Hal ini mengakibatkan efektivitas program dalam menekan angka kemiskinan menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut selaras dengan teori Marille S. Grindle yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus menghasilkan jenis manfaat yang memberikan dampak positif bagi target sasaran untuk mencapai keberhasilan implementasi. Dalam kasus Desa Laburasseng, meskipun manfaat program tersedia, ketidaktepatan sasaran menjadi penghambat signifikan dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih luas. Hal ini juga dapat dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya hubungan antara standar kebijakan dengan disposisi pelaksana. Ketidakesesuaian hasil di lapangan menunjukkan adanya kendala pada pemahaman atau sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan, sehingga program terimplementasi namun tidak selaras dengan target utama pengentasan kemiskinan. Fenomena ketidaktepatan sasaran di Desa Laburasseng memiliki pola yang berbeda dengan temuan Anhar et al. (2023) di Palembang; jika di Palembang kendala utama terletak pada kesalahan input data, di lokasi penelitian ini masalah justru bersumber dari sinkronisasi data pemerintah desa dengan otoritas pusat yang belum mutakhir.

Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan target atau tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam suatu kebijakan. Pada poin ini, Grindle (Subarsono, 2008) berusaha melihat derajat perubahan seperti apa yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki derajat perubahan yang diinginkan atau sebuah target yang ingin dicapai bagi sasaran atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan maupun program haruslah mempunyai sasaran atau tujuan yang jelas, begitu juga dengan program SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi

kemiskinan, meratakan kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Derajat perubahan yang diinginkan dalam program SDGs di Desa Laburasseng belum tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari data presentase jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Laburasseng dari tahun terimplementasinya SDGs sampai saat ini yaitu tahun 2021-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3. Presentase Jumlah Penduduk Miskin Desa Laburasseng

Tahun	Jumlah penduduk	Presentase penduduk miskin (%)
2021	1.250	15,63
2022	1.299	15,85
2023	1.275	15,74

Sumber: Data Kecamatan Libureng (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 presentase penduduk miskin Desa Laburasseng sebesar 15,63% kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 15,85% dan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,74%. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Desa Laburasseng meningkat setelah adanya program SDGs yang tentunya derajat perubahan yang diinginkan dalam program ini ialah untuk mengurangi kemiskinan belum tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadya Rindayu Farista Fanny (Fanny & Megawati, 2022) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dijelaskan bahwa tujuan dari program BPNT sudah tercapai sebab kebutuhan pangan Kecamatan Bancar menjadi tercukupi dan telah mengurangi pengeluaran untuk membeli sembako. Selain itu pemberian yang selalu tepat sasaran yakni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tepat jumlah sembako yang diberikan, tepat kualitas sembako yang diterima, serta tepat administrasi dalam pengolahan data penerima BPNT menjadikan tujuan program dapat tercapai.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Laburasseng, dimana tujuan dari program SDGs dalam hal ini bantuan sosial tidak tercapai dikarenakan bantuan yang diberikan tidak benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan dari perubahan yang diharapkan oleh para pelaksana belum berjalan efektif antara indikator perubahan menurut Grindle (Subarsono, 2008) dengan kondisi di lapangan, hal ini dapat dinilai dengan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan manfaat yang tidak merata dikalangan masyarakat Desa Laburasseng.

Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, pengambilan keputusan harus diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam teori Marille S. Grindle dalam (Subarsono, 2008) pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan standar dan tujuan kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dalam (Agustino, 2008) dimana letak pengambilan keputusan yang tidak jelas atau terlalu sentralisasi di tingkat pusat bisa menyebabkan tujuan kebijakan tidak terkomunikasikan dengan baik ke tingkat lokal. Ini dapat menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di desa, sehingga bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan, bahwa keputusan terkait penerima bantuan sosial berada di tingkat pusat. Data-data calon penerima telah dilakukan *chros check* setiap penginputan oleh pelaksana di desa kemudian upload di DTKS. Namun keputusan banyak diambil di pusat dan komunikasi dengan pemerintah desa tidak efektif, sehingga implementasi di tingkat lokal menjadi terganggu yang menyebabkan program tidak merata atau tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran dapat berupa nama penerima yang sudah meninggal ataupun pindah kependudukan tetapi masih tercatat dalam daftar penerima bansos.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alivia Tawaang (Tawaang et al., 2023) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Minhasa

Selatan Studi Di Dinas Sosial, dijelaskan bahwa dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan beserta koordinator dan staf pendamping PKH serta masyarakat telah melaksanakan atau menjalankan program sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh kementerian sosial sehingga pada pengambilan keputusan dapat efektif dan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program tersebut. Sedangkan pada penelitian ini pengambilan keputusan lembaga terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten Bone tidak berdasarkan pada DTKS Desa Laburasseng yang terbaru dikarenakan banyaknya data masyarakat yang dikeluarkan oleh dinsos dengan nama penerima yang sudah meninggal maupun pindah penduduk.

Hal yang serupa dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal dalam pengambilan keputusan akan kurang efektif dalam mengatasi masalah di tingkat desa. Lembaga pelaksana di desa memiliki pengetahuan lebih baik terkait kondisi lokal, tetapi jika mereka tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan maka kemampuan mereka untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal menjadi terbatas.

Proses pengambilan keputusan dalam implementasi bantuan sosial di Desa Laburasseng menunjukkan adanya ketimpangan antara partisipasi lokal dengan otoritas pusat. Meskipun Pemerintah Desa Laburasseng telah berupaya melibatkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah untuk menampung aspirasi dan protes terkait bantuan, namun keputusan final mengenai penetapan penerima manfaat tetap didominasi oleh kebijakan pemerintah pusat yang seringkali tidak efisien. Fenomena ini mengonfirmasi teori Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) bahwa kebijakan yang kurang mempertimbangkan konteks dan pengetahuan lokal dalam pengambilan keputusan cenderung menjadi kurang efektif dalam mengatasi persoalan spesifik di tingkat desa. Keterbatasan kekuasaan lembaga pelaksana di tingkat desa untuk menyesuaikan daftar penerima dengan kondisi riil di lapangan mengakibatkan program pengentasan kemiskinan melalui SDGs tidak berjalan optimal dan sering kali meleset dari target sasaran yang sebenarnya.

Pelaksana Program

Pelaksana merupakan orang atau sekelompok orang yang bertugas untuk menjalankan suatu program. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, pelaksana harus memiliki kemampuan agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam teori Marille S. Gindle dikatakan dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prayogi Winata (Winata et al., 2023) dengan judul Penelitian Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada indikator komunikasi dinilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar pemerintah desa, relawan satgas Covid-19, masyarakat desa, dan orang-orang yang tergabung dalam pelaksanaan Program BLT-DD tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Laburasseng, bahwa komunikasi ataupun koordinasi dengan pemerintah lokal dalam hal ini pemerintah desa dengan lembaga terkait seperti dinas sosial belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan data penerima bantuan sosial yang dikeluarkan oleh dinas sosial tidak selalu sinkron dengan data DTKS yang ada di pemerintah desa.

Teori implementasi Van Meter Van Horn (1973) memfokuskan pada pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Dalam kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran di Desa Laburasseng diakibatkan adanya koordinasi yang kurang baik antara pelaksana di desa dengan pengambil keputusan di tingkat pusat yang menyebabkan program tidak mencapai sasaran yang tepat. Teori Van Meter Van Horn (Agustino, 2008) juga menekankan pentingnya pemantauan program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran juga dikarenakan pemantauan program yang kurang efektif yang dapat menyebabkan program tidak mencapai tujuan yang seharusnya. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pemantauan program agar dapat memantau dan mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program SDGs di Desa Laburasseng memiliki peranan strategis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik pada setiap lini administratif. Secara operasional, sinergitas di tingkat pemerintah desa yang melibatkan Kepala Desa beserta jajaran Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, serta Kasi Perencanaan dan Pembangunan telah menunjukkan kinerja yang sejalan dengan indikator pelaksana dalam teori Marille S. Grindle. Namun, efektivitas kolektif dari para pelaksana ini terhambat oleh lemahnya koordinasi vertikal, di mana pengambil keputusan di tingkat pusat dinilai belum sinkron dalam menetapkan penerima manfaat bantuan sosial. Kondisi ini menegaskan relevansi teori Van Meter dan Van Horn mengenai pentingnya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas implementasi; ketidaksesuaian data antara pusat dan desa menunjukkan adanya hambatan dalam transmisi standar tujuan kebijakan, sehingga kapasitas pelaksana lokal yang sudah baik tidak dapat menutupi kekurangan akurasi keputusan di tingkat pusat.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya pendukung di Desa Laburasseng saat ini masih menghadapi kendala signifikan, terutama pada aspek infrastruktur fisik seperti kondisi jalan yang rusak. Masalah infrastruktur ini secara langsung menghambat efisiensi proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain aspek fisik, keterbatasan sumber daya informasi juga terlihat dari adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah desa dengan instansi di tingkat pusat, yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya pendukung, sebagaimana ditekankan dalam teori Marille S. Grindle. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang jelas sekalipun tidak akan mampu beroperasi secara efektif. Hal ini selaras dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa sumber daya merupakan variabel kunci dalam implementasi; ketersediaan dana, tenaga kerja, hingga infrastruktur yang memadai adalah syarat mutlak agar program berjalan sesuai rencana. Berbeda dengan temuan Meiske (2015) di Palu Selatan yang menunjukkan bahwa kecukupan fasilitas dan kompetensi implementor mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH), hambatan sumber daya di Desa Laburasseng justru menjadi faktor kritis yang menghalangi pencapaian target SDGs dalam menangani kemiskinan

Kesimpulan

Implementasi program SDGs dalam menangani kemiskinan di Desa Laburasseng dinilai belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka teori Marille S. Grindle. Ketidakefektifan ini terlihat pada variabel isi kebijakan, di mana indikator manfaat, derajat perubahan, dan sumber daya belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun bantuan sosial telah tersalurkan, tujuannya untuk menekan angka kemiskinan tidak tercapai secara signifikan karena banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran. Masalah utama terletak pada lemahnya koordinasi vertikal antara pelaksana di tingkat desa dengan pengambil keputusan di tingkat pusat, serta penggunaan data penerima manfaat yang tidak mutakhir. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jalan di desa turut menjadi hambatan fisik dalam distribusi sumber daya bantuan. Pemerintah Desa Laburasseng perlu meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk memastikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan secara berkala dan akurat. Selain itu, diperlukan kebijakan pendukung untuk perbaikan infrastruktur aksesibilitas desa guna menunjang kelancaran program-program pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Referensi

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anhar, R., Kariem, M. Q., & Febriyanti, D. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 38–48. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24246>.

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2022*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2023). *Kabupaten Bone Dalam Angka 2023*. Watampone: BPS Kabupaten Bone.
- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 10(2), 407–418. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p407-418>.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2014). *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*. Duke University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Panduan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, 361–368.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Illinois: Scott, Foresman and Co.
- Meiske. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 80–93.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rukmana, N. S., Sakawati, H., & Yamin, N. M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Melalui Social Preneur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 293–297.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tawaang, A., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Minahasa Selatan Studi Di Dinas Sosial. *Eksekutif*, 3(2), 1–11.
- Winata, P., Isabella, I., & Walidain, A. (2023). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.23955>.
- Zaini, I. F. (2021). Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-52.